

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia selama revolusi industri 4.0 menghadirkan tantangan dan peluang yang signifikan di tengah pertumbuhan ekonomi (Lukmanul & Hapsari, 2022). Pertumbuhan ekonomi tersebut secara langsung berkontribusi pada meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses layanan keuangan atau yang disebut dengan inklusi keuangan (Badan Kebijakan Fiskal, 2023). Jadi, inklusi keuangan mengacu pada ketersediaan barang dan jasa berkualitas tinggi yang mudah diakses, berkelanjutan, disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya masyarakat dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat (Peraturan OJK, 2023).

Pada era digital, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat mengakses dan menggunakan layanan keuangan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh tingkat penetrasi internet suatu wilayah (Damayanti & Zakarias, 2020). Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet Indonesia meningkat setiap tahunnya, mencapai 78,19% pada tahun 2023 (APJII, 2023). Dengan demikian, maka peningkatan tingkat penetrasi internet di Indonesia secara langsung berkaitan dengan inklusi keuangan, mengingat teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan akses lebih luas terhadap layanan keuangan.

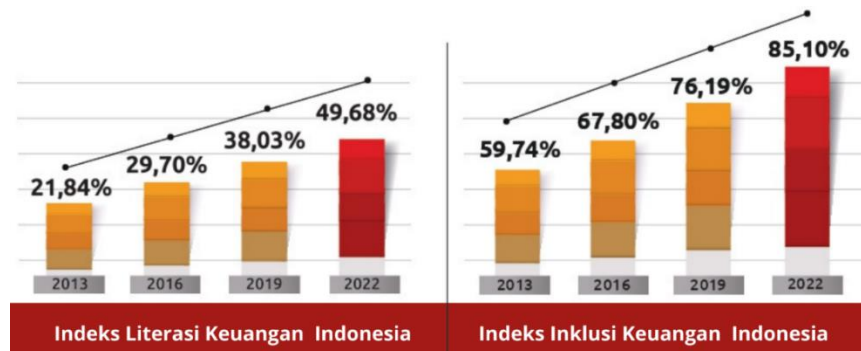
Program inklusi keuangan di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 2010, di mana Bank Indonesia meluncurkan *National Strategy for Financial Inclusion (NSFI)* untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, terutama

bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan (*unbanked*) (Sadari & Hakim, 2019). Pada tahun 2013 Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI), dan selanjutnya dikeluarkan Perpres nomor 82 tahun 2016 yang menyatakan bahwa Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menjadi landasan dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan lembaga keuangan (Damayanti & Zakarias, 2020). Sejak saat itu, literasi dan inklusi keuangan telah menjadi dua aspek yang sangat signifikan dalam mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Literasi keuangan (*financial literacy*) adalah pengetahuan, kemampuan, dan keyakinan yang berperan dalam membentuk sikap serta perilaku individu dalam mengelola keuangan guna mencapai kesejahteraan finansial (Peraturan OJK, 2023). Individu yang memiliki pemahaman tentang keuangan cenderung lebih tertarik untuk memanfaatkan layanan keuangan dengan dengan lebih efektif. Hal ini didukung oleh penelitian Sari et al. (2022), Fanta & Mutsonziwa (2021), Andyni & Kurniasari (2021) dan Muslichah et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang produk dan layanan keuangan yang relevan dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan keuangan.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) dan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) adalah Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Meskipun literasi keuangan dan inklusi keuangan ini saling terkait, namun kenyataannya

tingkat inklusi keuangan yang tinggi tidak selalu diiringi oleh tingkat literasi keuangan yang setara (Nasmiah et al., 2023). Hasil SNLIK pada gambar 1.1 berikut menunjukkan adanya kesenjangan atau gap yang signifikan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.



Gambar 1.1: Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022

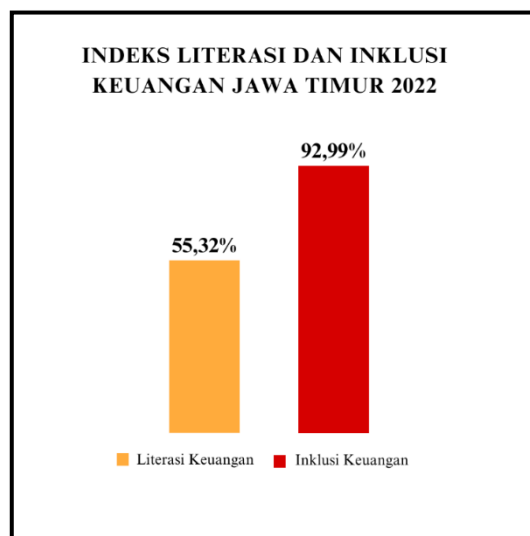
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2022)

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>

Berdasarkan data yang disajikan dalam gambar 1.1, indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi, adanya peningkatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan kesejahteraan pada masyarakat (Sari & Kautsar, 2020). Data dari Bank Indonesia (2023), menunjukkan bahwa sekitar 48% penduduk Indonesia masih termasuk dalam kategori *unbanked* atau belum memiliki akses perbankan. Selain itu, 11 dari 34 provinsi di Indonesia memiliki nilai indeks inklusi keuangan yang lebih rendah dari rata-rata nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Ketidaksetaraan kesejahteraan masyarakat tersebut disebabkan oleh adanya hambatan dalam upaya mencapai inklusi keuangan di Indonesia (Peraturan Presiden, 2020). Salah satu hal yang menjadi hambatan yakni keberagaman

geografis yang mempengaruhi pembangunan fasilitas umum, termasuk layanan keuangan yang belum merata, sehingga sebagian masyarakat masih belum memiliki akses penuh terhadap layanan keuangan (Putra et al., 2023). Selain itu, tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang tinggi juga menjadi tantangan dalam mencapai inklusi keuangan yang optimal (Bank Indonesia, 2023).



Gambar 1.2: Hasil Survei Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Jawa Timur 2022

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2022)

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>

Berdasarkan Gambar 1.2 hasil Survei Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Jawa Timur 2022, provinsi Jawa Timur memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan di atas angka rata-rata nasional, yaitu sebesar 55,32% dan 92,99% (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Selain itu, Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur juga dinilai tinggi, yang mencapai 4,86% pada triwulan III tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2023). Meskipun demikian, data BPS lainnya menunjukkan fakta yang kontras, di mana Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah

penduduk miskin tertinggi di Indonesia, mencapai 4,11 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kemajuan inklusi keuangan dalam mengatasi kemiskinan dengan mendukung faktor-faktor pertumbuhan, seperti meningkatkan akses masyarakat terhadap kemungkinan mobilisasi tabungan dan kewirausahaan, menurunkan kerentanan masyarakat terhadap risiko, dan meningkatkan standar hidup mereka (Asif et al., 2023).

Bersamaan dengan adanya situasi di Jawa Timur yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana tingkat literasi dan inklusi keuangan yang tinggi bertentangan dengan tingginya jumlah penduduk miskin, teknologi keuangan (lebih dikenal sebagai *fintech*) menunjukkan pertumbuhan yang pesat (Sangwan et al., 2019). Menurut *Annual Member Survey 2023* oleh Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), jumlah perusahaan *fintech* yang terdaftar di asosiasi meningkat menjadi 366 perusahaan (AFTECH, 2023). Selain itu, laporan *East Ventures-Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2023* juga mencatat adanya peningkatan signifikan dalam transaksi digital, dengan kenaikan sebesar 32% dibandingkan tahun 2019 (East Ventures, 2023)

Teknologi keuangan sendiri merupakan industri teknologi informasi yang menciptakan inovasi dalam layanan keuangan, memfasilitasi akses ke produk keuangan, dan menyederhanakan proses transaksi bagi masyarakat (Andarujati, 2023). Teknologi ini telah membuat semua jenis transaksi menjadi cepat, sederhana, terjangkau, dan efektif (Sadari & Hakim, 2019). Oleh karena itu, teknologi keuangan meningkat karena memberikan kemudahan akses dan proses transaksi serta inovasi-inovasi dalam layanan keuangan yang dihadirkan seperti

pinjaman melalui aplikasi *online*, pembayaran secara digital dan investasi melalui platform digital (Asif et al., 2023).

Dalam konteks inklusi keuangan, perkembangan teknologi keuangan diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sebelumnya tidak dapat atau susah dijangkau secara efektif (Sari & Kautsar, 2020). Ini berarti teknologi keuangan memainkan peran penting dalam mempercepat inklusi keuangan dan memperluas cakupannya ke berbagai sektor, mulai dari desa modern hingga desa tradisional, didorong oleh kemajuan teknologi keuangan dan literasi keuangan (Purwanto et al., 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Asif et al. (2023), Rohmah & Gunarsih (2021) dan Sari et al. (2022) yang mengungkapkan pengaruh positif teknologi keuangan (*fintech*) terhadap inklusi keuangan. Akan tetapi, dalam penelitian Sari & Kautsar (2020) dan Wewengkang et al. (2021) menunjukkan hasil sebaliknya, bahwa teknologi keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap inklusi keuangan.

Perkembangan teknologi keuangan yang pesat tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga menimbulkan sejumlah risiko seperti penipuan, kejahatan, dan tindak kecurangan (Wardani & Darmawan, 2020). Oleh karena itu, selain literasi keuangan, kesadaran akan efikasi keuangan (lebih dikenal dengan *financial self-efficacy*) juga penting dalam menghadapi risiko-risiko tersebut. Dalam hal ini, penggunaan produk dan layanan keuangan dipengaruhi oleh perilaku konsumen, yang mencakup keyakinan orang pada kemampuan mereka untuk mengelola situasi tanpa merasa kewalahan (Andyni & Kurniasari, 2021).

Menurut Rufaidah et al. (2023) efikasi keuangan merujuk pada keyakinan positif individu terhadap kemampuannya untuk mengelola keuangan pribadinya dengan baik. Individu dengan efikasi keuangan memiliki keyakinan atas kemampuan mereka dalam menjalankan aktivitas keuangan, yang pada gilirannya dapat mendorong pemanfaatan produk dan layanan keuangan (Muslichah et al., 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian Andyni & Kurniasari (2021), Lamusu et al. (2024) dan Hasanudin (2022) yang menyebutkan bahwa efikasi keuangan berdampak positif terhadap inklusi keuangan. Akan tetapi, penelitian Muslichah et al. (2023) menyatakan sebaliknya.

Mahasiswa dianggap sebagai salah satu kelompok dalam masyarakat yang berada pada tahap transisi menuju kemandirian finansial, sehingga mereka menghadapi tantangan dalam menggunakan layanan keuangan (Lamusu et al., 2024). Hal tersebut selaras dengan penelitian Diwangsa & Sari (2024) yang mengemukakan bahwa generasi muda, terutama mahasiswa, akan menghadapi peningkatan kompleksitas dalam produk-produk keuangan serta harus menghadapi risiko keuangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dialami oleh orang tua mereka (Diwangsa & Sari, 2024). Oleh karena itu, sangat penting bagi mahasiswa memiliki pemahaman terkait literasi keuangan, pemanfaatan teknologi keuangan (*fintech*), serta efikasi keuangan untuk menghadapi tantangan dalam mengakses layanan keuangan yang pada kemudian dapat mengoptimalkan inklusi keuangan (Liska et al., 2022).

Mahasiswa juga merupakan generasi *digital native* yang familiar dengan teknologi keuangan (Hadjaratie et al., 2023). Selain itu, pengetahuan tentang

keuangan yang mereka peroleh melalui pendidikan perguruan tinggi turut membentuk sikap dan perilaku keuangan mereka (Nusron et al., 2021), terutama di kalangan mahasiswa jurusan akuntansi. Mahasiswa jurusan S-1 akuntansi telah melalui proses pembelajaran mencakup aspek-aspek keuangan yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang keuangan (Puspita & Isnalita, 2019). Oleh karena itu, mereka dianggap relevan untuk dikaji dalam penelitian ini. Sehubungan dengan fenomena di Jawa Timur seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan difokuskan pada mahasiswa jurusan akuntansi di Jawa Timur.

Penelitian ini dilandasi oleh teori perilaku terencana (TPB), mengingat teori ini telah digunakan secara global untuk menguji inklusi keuangan (Musa et al., 2024). Menurut Ajzen (1991), TPB digunakan untuk menjelaskan dan memprediksikan bagaimana perilaku individu. Dalam teori TPB perilaku individu ditentukan oleh niat untuk berperilaku, yang dapat dipengaruhi oleh tiga faktor utama yakni sikap terhadap perilaku (*attitude towards the behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*) (Ajzen, 1991).

Perilaku dalam konteks penelitian ini adalah perilaku keuangan. Perilaku keuangan sendiri merupakan tindakan serta keputusan yang diambil individu yang berhubungan dengan keuangan seperti menabung, berinvestasi, meminjam, dan lain-lain (Alkhalid et al., 2023). Perilaku keuangan memiliki peran krusial dalam inklusi keuangan, karena hal ini memungkinkan individu untuk mengambil keputusan keuangan yang bijak serta mengakses layanan keuangan dengan lebih

efektif (Musa et al., 2024). Partisipasi individu dalam layanan keuangan dianggap sebagai perilaku yang direncanakan karena seseorang dapat memutuskan untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi meskipun layanan keuangan tersebut tersedia (Maune et al., 2021).

Dalam penelitian ini, perilaku keuangan digunakan sebagai variabel mediasi. Disebut sebagai variabel mediasi karena variabel tersebut memengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Baron & Kenny, 1986). Menurut Alkhaldeh et al. (2023), perilaku keuangan dapat terpengaruh oleh berbagai faktor, seperti literasi keuangan, teknologi keuangan dan efikasi keuangan. Shneor & Munim (2019), berpendapat bahwa niat dan faktor lainnya yang berpengaruh, akan memotivasi perilaku seseorang untuk berpartisipasi dalam inklusi keuangan (Musa et al., 2024). Hal ini sesuai dengan riset Arofah (2019) dan Alkhaldeh et al. (2023) yang mengemukakan bahwa literasi keuangan, teknologi keuangan, serta efikasi keuangan memberikan pengaruh yang positif pada perilaku keuangan, serta riset Cuandra & Anjela (2021) dan Sun & Angelina (2022) yang menunjukkan bahwa perilaku keuangan memiliki pengaruh positif terhadap inklusi keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan, Teknologi Keuangan, dan Efikasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan pada Era Digital dengan Perilaku Keuangan sebagai Variabel Mediasi.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan?
2. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap inklusi keuangan?
3. Apakah teknologi keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan?
4. Apakah teknologi keuangan berpengaruh terhadap inklusi keuangan?
5. Apakah efikasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan?
6. Apakah efikasi keuangan berpengaruh terhadap inklusi keuangan?
7. Apakah perilaku keuangan berpengaruh terhadap inklusi?
8. Apakah perilaku keuangan dapat memediasi pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan?
9. Apakah perilaku keuangan dapat memediasi pengaruh teknologi keuangan terhadap inklusi keuangan?
10. Apakah perilaku keuangan dapat memediasi pengaruh efikasi keuangan terhadap inklusi keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan.
2. Untuk membuktikan pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan.
3. Untuk membuktikan pengaruh keuangan terhadap perilaku keuangan.
4. Untuk membuktikan pengaruh keuangan terhadap inklusi keuangan.

5. Untuk membuktikan pengaruh efikasi keuangan terhadap perilaku keuangan.
6. Untuk membuktikan pengaruh efikasi keuangan terhadap inklusi keuangan.
7. Untuk membuktikan pengaruh perilaku keuangan terhadap inklusi.
8. Untuk membuktikan bahwa perilaku keuangan dapat memediasi pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan.
9. Untuk membuktikan bahwa perilaku keuangan dapat memediasi pengaruh teknologi keuangan terhadap inklusi keuangan.
10. Untuk membuktikan bahwa perilaku keuangan dapat memediasi pengaruh efikasi keuangan terhadap inklusi keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berperan serta dalam pengembangan literatur mengenai inklusi keuangan dengan menyusun rancangan penelitian yang mengintegrasikan karakteristik variabel dari studi-studi sebelumnya. Selain itu, studi ini juga dapat menjadi panduan bagi peneliti di masa depan yang ingin menerapkan teori perilaku terencana untuk menyelidiki hubungan antara inklusi keuangan, teknologi keuangan, efikasi keuangan, perilaku keuangan, dan literasi keuangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait inklusi keuangan, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berharga untuk masyarakat dan pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan, serta menjadi dasar pertimbangan yang penting dalam merancang dan menjalankan

program dan kebijakan terkait inklusi keuangan. Selain itu, temuan pada riset ini diharapkan mampu berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, pendekatan, dan langkah-langkah yang lebih efisien dalam memperkuat inklusi keuangan secara menyeluruh, termasuk upaya untuk menjangkau masyarakat yang belum dilayani oleh perbankan di seluruh pelosok daerah melalui tindakan yang terarah dan berkelanjutan. Untuk peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian terkait literasi keuangan, teknologi keuangan, efikasi keuangan, inklusi keuangan dan perilaku keuangan.